

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Menurut Gilarso, “pembangunan ekonomi adalah usaha pembangunan khusus yang dilakukan untuk mengubah kondisi masyarakat menuju arah yang lebih baik di bidang ekonomi pada sektor pertanian, pertambangan, industri, energi, perhubungan, perdagangan, perbankan, dan sebagainya.”¹ Sasaran pembangunan ekonomi adalah peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, kenaikan pendapatan per kapita, distribusi pendapatan yang merata, stabilitas ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja. Pembangunan ekonomi membutuhkan perencanaan, pengaturan, dan pedoman dengan tujuan menciptakan kekuatan untuk perbaikan dan pemeliharaan faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi.

Menurut Prof. Meier, “pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai proses kenaikan pendapatan riil per kapita dalam suatu jangka waktu yang panjang.”² Pembangunan ekonomi tersebut merupakan peningkatan suatu kapasitas untuk memproduksi berbagai barang dan jasa dalam jangka panjang. Hal ini ditunjang oleh kemajuan teknologi dalam memproduksi barang dan jasa tersebut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan riil per kapita.

Menurut Lincoln Arsyad, “pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membuat suatu kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja yang baru dan merangsang

¹ T Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 336

² Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 205.

pertumbuhan ekonomi suatu daerah.”³ Pengertian di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya semua pihak baik pemerintah maupun swasta sama-sama berusaha mengelola sumber daya yang tersedia di suatu daerah wilayahnya dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan, secara alamiah umat manusia bekerja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pasti memiliki satu tujuan yang sama yaitu meningkatkan taraf hidup.⁴

b. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan volume ekonomi dari suatu sub sistem spasial suatu bangsa atau negara. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu peningkatan dalam kemakmuran suatu wilayah. Pertumbuhan di sini bertujuan sebagai peningkatan suatu keluaran wilayah. Peningkatan tersebut meliputi kapasitas produksi ataupun volume riil produksi. Pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian suatu negara maju, ditentukan oleh pertumbuhan input, yaitu tenaga kerja dan modal, serta perkembangan teknologi.⁵

Menurut Adam Smith pemerintah mempunyai tiga fungsi utama untuk mendukung perekonomian, antara lain sebagai berikut⁶:

- 1) Memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan
- 2) Menyelenggarakan peradilan

³ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2010), 374.

⁴ Faried Wijaya, *Seri Pengantar Ekonomika: Ekonomikamakro* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 265.

⁵ Paul A Samuelson dan William D Nordhaus, *Makro Ekonomi*, terj. Haris Munandar, Freddy Saragih, dan Rudy Tambunan (Jakarta: Erlangga, 1992), 263.

⁶ Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti, “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya,” *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 9, no. 1 (2008): 46.

- 3) Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti infrastruktur dan fasilitas umum.

Sehingga keberadaan pemerintah juga sangat berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai cara dan dengan mengandalkan kekuasaannya dalam mengatur kegiatan ekonomi dan membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

c. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara.⁷ Namun untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, dengan tidak memperhatikan dari mana faktor produksi yang digunakan tersebut berasal. Perhitungan PDRB menggunakan atas dasar dua harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku adalah nilai barang dan jasa suatu daerah yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai barang dan jasa suatu daerah yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan acuan. Penghitungan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk perencanaan

⁷ Mawarni, dkk, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh),” *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syaih Kuala* 2, no. 2 (2013): 83.

ekonomi, proyeksi dan menilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral.⁸

d. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat teori-teori yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Adapun penjelasan dari beberapa teori pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut⁹:

1) Aliran Klasik

Aliran klasik pertama kali muncul pada akhir abad ke-18 yang dipelopori oleh Bapak Ekonomi yaitu Adam Smith, beliau mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dikarenakan oleh faktor kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Kedua hal tersebut bukanlah faktor yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara langsung. Namun, semuanya berkaitan erat dengan faktor-faktor pendukung lainnya. Kemajuan teknologi tersebut dapat berjalan lancar berdasar pada pembentukan modal. Adanya akumulasi modal yang akan digunakan untuk kemajuan teknologi, maka dapat memungkinkan dilaksanakannya spesialisasi atau pembagian kerja sesuai dengan keahliannya sehingga produktivitas tenaga kerja dapat meningkat. Hal tersebut dapat berdampak pada penambahan investasi dan persediaan modal, dimana nantinya diharapkan akan menambah pendapatan dan meningkatkan kemajuan teknologi.

Semboyan yang paling dikenal dalam aliran klasik adalah *laissez faire laissez passer* atau persaingan bebas. Maksudnya di sini adalah tidak adanya intervensi atau campur tangan pemerintah dalam perdagangan dan perekonomian. Menurut Adam Smith, berlangsungnya perkembangan ekonomi dibutuhkan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja dapat meningkat. Pembangunan dan pertumbuhan

⁸ Badan Pusat Statistik, *Pedoman Praktis Perhitungan PDRB Kabupaten/Kota: Pengertian Dasar* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2008), 38.

⁹ Rahardjo, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, 22-32.

merupakan hal yang bersifat kumulatif, artinya akan berlangsung terus dan semakin meningkat. Apabila terdapat pasar yang cukup besar dan ada akumulasi modal, maka akan mendorong pembagian kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan memperbesar jumlah penduduk. Penduduk merupakan pasar karena pendapatannya meningkat dan penduduk juga merupakan sumber tabungan yang digunakan untuk akumulasi modal. Sehingga hal tersebut akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

2) Aliran Neo Klasik

Ahli-ahli neo klasik memiliki beberapa pemikiran mengenai teori pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

- a) Akumulasi modal merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi
- b) Pertumbuhan ekonomi merupakan proses yang gradual
- c) Pertumbuhan ekonomi merupakan proses yang harmonis dan kumulatif
- d) Aliran neo klasik merasa optimis terhadap pertumbuhan.

Tingkat pertumbuhan terdiri dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, penawaran tenaga kerja dan kemajuan teknik. Model neo klasik ini berbeda dengan model sebelumnya karena mengandung teori tentang mobilitas faktor. Implikasi dari persaingan sempurna adalah modal dan tenaga kerja akan berpindah apabila balas jasa faktor-faktor tersebut berbeda-beda. Modal akan berarus dari daerah yang mempunyai tingkat biaya tinggi ke daerah yang mempunyai tingkat biaya rendah. Hal ini dikarenakan keadaan tersebut dapat memberikan suatu penghasilan yang lebih tinggi. Begitu pula dengan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan di suatu daerah, maka akan berpindah ke daerah lain yang memiliki harapan lapangan kerja baru. Sehingga hal tersebut dapat digunakan sebagai

faktor pendorong untuk pembangunan di daerah tersebut.

3) Aliran Keynes

Aliran Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat atau permintaan efektif sebagai faktor utama penggerak perekonomian, di mana baik negara maupun sektor swasta sama-sama menjadi pemegang peranan penting. Keynes memandang pemerintah sebagai pihak independen yang mampu memberikan pengaruh perekonomian melalui kerja publik. Kebijakan pemerintah yang ekspansioner dapat menaikkan "permintaan efektif" apabila sumber daya yang dipakai tidak merugikan konsumsi atau investasi. Kenaikan pada pengeluaran Pemerintah (G) akan mendorong kenaikan konsumsi (C) dan investasi (I), sehingga dapat menaikkan GDP (Y).¹⁰

4) Teori Sektor (*Sector Theory of Growth*)

Teori sektor ini dikembangkan berdasar hipotesis Clark Fisher yang mengemukakan bahwa kenaikan pendapatan per kapita akan diikuti oleh penurunan dalam proporsi sumber daya yang digunakan dalam sektor pertanian, kenaikan dalam sektor industri manufaktur dan juga dalam industri jasa.

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat empat faktor atau komponen utama yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah, sebagai berikut:

1) Sumber Alam

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber alam atau tanah. Tanah yang dimaksud di sini meliputi sumber alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral,

¹⁰ Rini Sulistiawati, "Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 3, no. 1 (2012): 36.

iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. “J.L. Fisher mengatakan, tidak cukup beralasan untuk mengharapkan pengembangan sumber alam jika orang acuh tak acuh pada produk dan jasa yang dapat disumbangkan oleh sumber-sumber tersebut.”¹¹ Tersedianya sumber alam yang melimpah tidak menjamin pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dapat meningkat. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat apabila suatu wilayah dapat memanfaatkan sumber alam yang dimiliki dengan sangat baik dan tepat. Suatu wilayah yang memiliki sumber alam yang melimpah namun perekonomiannya tidak meningkat dapat disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan sumber alam yang tepat dan kurangnya fasilitas teknologi untuk memanfaatkan sumber alam tersebut. Hal ini dapat diatasi melalui peningkatan pengetahuan masyarakat dan perbaikan teknologi. Sehingga sumber alam yang dimiliki tidak sia-sia begitu saja dan dapat dimanfaatkan dengan tepat yang nantinya akan mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi meningkat.

2) Akumulasi Modal

“Professor Nurkse mengemukakan bahwa, makna pembentukan modal ialah masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak, tetapi mengarahkan sebagian daripadanya untuk pembuatan barang modal, alat-alat dan perlengkapan, mesin dan fasilitas pengangkutan, pabrik dan peralatannya.”¹²

Akumulasi modal (*capital accumulation*) merupakan kegiatan menabung dan

¹¹ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, terj. D.Guritno (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 68.

¹² M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, 69.

menginvestasikan kembali sebagian dari pendapatan dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Investasi produktif yang bersifat langsung harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang, yaitu investasi infrastruktur ekonomi dan sosial. Contohnya adalah pembangunan jalan-jalan raya, penyediaan listrik, penyediaan air, pembangunan fasilitas dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi produktif. Selain investasi yang bersifat langsung, ada juga investasi yang bersifat tidak langsung yaitu untuk menginvestasikan dana dalam berbagai jenis sumber daya.¹³

Investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dapat berdampak positif terhadap jumlah produksi, bahkan nantinya akan bertambah lebih besar lagi jika ada pertumbuhan penduduk. Investasi dalam hal ini contohnya adalah pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kerja, serta pendidikan informal lainnya. Hal tersebut dapat ditunjang melalui investasi secara langsung yaitu pembangunan gedung-gedung, pengadaan perlataan dan buku-buku, serta pembangunan lainnya yang dapat menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3) **Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja**

Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja secara tidak langsung dianggap sebagai salah satu faktor positif yang mendukung pertumbuhan ekonomi.¹⁴ Jika dilihat dari sisi positifnya, jumlah tenaga kerja yang semakin bertambah akan mengakibatkan jumlah tenaga produktif juga semakin bertambah, sedangkan jumlah penduduk yang semakin banyak akan mengakibatkan semakin luasnya pasar domestik.

¹³ Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi 1*, terj. Haris Munandar (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 111.

¹⁴ Michael, *Pembangunan Ekonomi I*, 112.

4) Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi (*technological progress*) merupakan faktor yang penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Secara sederhananya, kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan dari metode lama dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan manual. Menurut Kuznets, terdapat lima pola penting pengembangan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi modern, yaitu “penemuan ilmiah atau penyempurnaan pengetahuan teknik, invensi, inovasi, penyempurnaan dan penyebarluasan penemuan yang biasanya diikuti dengan penyempurnaan.”¹⁵

f. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Perspektif Islam

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan “*a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare*”¹⁶ yang artinya “pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia.” Pertumbuhan ekonomi menurut islam adalah suatu peningkatan nilai ekonomi yang dialami oleh faktor-faktor produksi secara baik, benar, dan sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam.

Persoalan mengenai pertumbuhan ekonomi yang dipandang dari agama Islam, berawal dari Firman Allah SWT pada surat Hud ayat 61 yang berbunyi:

وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَاحِبًا ۖ قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ
مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ

¹⁵ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, 72.

¹⁶ Almizan, “Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2016): 206.

فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَىٰ إِلَهِهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّحِيتٌ

٦١ -

Artinya : “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".”¹⁷

Terminologi “pemakmuran bumi” tersebut mengandung makna pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir: “Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar dari pada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran bumi. Barang siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan hancur.”¹⁸

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan faktor produksi secara terus-menerus dengan baik dan benar sehingga akan memberikan konstribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Dan Allah SWT telah menyediakan bumi (tanah) untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menurut perspektif Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuan pertumbuhan ekonomi bukan

¹⁷ Alquran, Hud ayat 61, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 182.

¹⁸ Rizal Muttaqin, “Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 120.

semata-mata hanya kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Kedua-duanya menurut Islam dapat menyatu secara integral.

2. Investasi

a. Pengertian Investasi

Investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan *investment*. Terdapat ahli yang mempunyai pemikiran yang berbeda tentang konsep investasi. Salah satunya Fitzgerald mendefinisikan, “investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.”¹⁹

Definisi lain menurut Kamaruddin Ahmad, “investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.”²⁰ Definisi tersebut lebih memfokuskan konsep investasi pada penempatan uang atau dana dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Menurut Rahardja dan Manurung, “Investasi merupakan suatu keputusan untuk menunda konsumsi sumber daya atau pendapatan dengan tujuan meningkatkan kemampuan menambah atau menciptakan penghasilan dan kekayaan di masa yang akan datang.”²¹

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai definisi investasi di atas dapat disimpulkan bahwa, investasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penanaman modal (dana) yang dilakukan oleh seorang investor pada berbagai bidang atau sektor usaha dengan

¹⁹ Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 31.

²⁰ Salim dan Budi, *Hukum Investasi di Indonesia*, 32.

²¹ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: FE UI, 2005), 62.

tujuan memperoleh keuntungan tertentu atas dana tersebut.

b. Jenis-jenis Investasi

Investasi dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu berdasarkan asset dan sumber pembiayaannya. Berikut penjelasan masing-masing golongan²²:

1) Investasi berdasarkan asetnya

Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi yang dilihat dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua, antara lain:

a) *Real Asset*

Real asset merupakan investasi yang berwujud, seperti gedung-gedung, kendaraan, dan sebagainya. Jika dilihat dari sisi likuiditasnya, *real asset* secara umum kurang likuid. Hal ini dikarenakan tipe investasi berwujud adalah investasi pada barang-barang yang memiliki umur ekonomi panjang dan bertujuan untuk investasi jangka panjang. Sehingga dapat dikatakan investasi *real asset* tingkat likuiditasnya adalah rendah.

b) *Financial Asset*

Financial Asset merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Jika dilihat dari sisi likuiditasnya, *financial asset* secara umum sangat likuid. Hal ini dikarenakan tipe investasi keuangan adalah investasi pada kegiatan keuangan yang tidak memiliki umur ekonomis dan bertujuan untuk investasi jangka pendek. Sehingga dapat dikatakan investasi *financial asset* tingkat likuiditasnya adalah tinggi.

²² Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 37-38.

2) Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya

Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

a) Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA)

Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA) merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri.

b) Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN)

Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN) merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

c. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)

Pengertian Modal dalam Negeri (MDN) dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Modal Dalam Negeri (MDN) adalah:

“Bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/ disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.”²³

Pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga disebutkan pengertian Modal Dalam Negeri (MDN). “Modal Dalam Negeri (MDN) adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara

²³ Salim dan Budi, *Hukum Investasi di Indonesia*, 103.

Indonesia, dan atau badan usaha Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.”²⁴ Jadi, dapat diketahui dari pengertian tersebut, pihak-pihak yang memiliki modal dalam negeri adalah:

- 1) Negara Indonesia
- 2) Perseorangan warga negara Indonesia
- 3) Badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

d. Penanaman Modal Asing (PMA)

Pengertian penanaman modal asing dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). “Penanaman modal asing (PMA) adalah modal yang hanya mencakup modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan digunakan menjalankan perusahaan di Indonesia.”²⁵ Modal asing yang dilakukan secara langsung maksudnya adalah investor secara langsung akan mendapatkan keuntungan dan menanggung semua risiko yang mungkin akan dialami dari penanaman modal tersebut.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga menjelaskan mengenai pengertian penanaman modal asing.

“Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”²⁶

Modal asing yang berpatungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal dalam negeri, namun porsi saham yang boleh dimiliki oleh

²⁴ Salim dan Budi, *Hukum Investasi di Indonesia*, 104.

²⁵ Salim dan Budi, *Hukum Investasi di Indonesia*, 147.

²⁶ Salim dan Budi, *Hukum Investasi di Indonesia*, 148.

pihak asing maksimal sebesar 95% dan porsi saham yang boleh dimiliki pihak penanam modal dalam negeri sebesar 5%.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga telah menjelaskan mengenai pengertian modal asing. “Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.”²⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui siapa saja yang dapat dikategorikan pemilik modal asing. Adapun pemilik modal asing sebagai berikut:

- 1) Negara asing
- 2) Perseorangan warga negara asing
- 3) Badan usaha asing
- 4) Badan hukum asing
- 5) Badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menjelaskan mengenai bentuk-bentuk penanaman modal asing. Bentuk penanaman modal asing sebagai berikut:²⁸

- 1) Berbentuk valuta asing saja
- 2) Alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan menjalankan perusahaan di Indonesia
- 3) Penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia
- 4) Keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia.

e. Investasi Menurut Perspektif Islam

Investasi menurut Islam adalah jenis kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, sehingga berpengaruh terhadap return (kembali) yang tidak pasti dan tidak

²⁷ Salim dan Budi, *Hukum Investasi di Indonesia*, 150.

²⁸ Salim dan Budi, *Hukum Investasi di Indonesia*, 150.

tetap.²⁹ Investasi memiliki return dan resiko yang tidak dapat dipastikan nominalnya karena keuntungan perusahaan di masa yang akan datang tidak dapat dipastikan. Sehingga investasi ini berbeda dengan sistem bunga, di mana sistem bunga memiliki return yang dapat dipastikan nominalnya. Islam sangat melarang sistem bunga karena terdapat unsur riba di dalamnya, namun Islam sangat menganjurkan untuk melakukan investasi.

Persoalan mengenai investasi terdapat di dalam Al-Qur'an dalam surat Yusuf ayat 46-49, Allah SWT berfirman:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ
سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعِ سُنَنِ بُلَّتٍ حَضِرٍ وَأُخْرٍ يُسَلِّتُ
لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ - ٤٦
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي
سُنَنِ إِلَهِ ۖ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ - ٤٧
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ
لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُخْصِنُونَ - ٤٨
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ
يَعْصِرُونَ - ٤٩

Artinya:46. "Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi

²⁹ Khairul Umam, "Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Jumlah Pengangguran Di Kota Bandarlampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2006-2015," (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 25.

betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.”

47. “Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.”

48. “Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.”

49. “Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).”³⁰

Makna dari ayat di atas, “terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) dan (tujuh) lainnya yang kering.” Menurut para ahli sejarah, disebutkan bahwa raja mesir di masa Yusuf adalah seorang raja Arab yang disebut Ru’aat (Heksos). Dan bahwa dia telah bermimpi yang berkelanjutan sehingga mengganggu pikirannya. Kemudian dia mengutus para pembesar Negara, juru ramal dan orang pandai waktu itu, namun tidak ada yang bisa mentakwilkan mimpinya. Kemudian salah satu pelayan yang mengetahui masalahnya dan menceritakan kepada Yusuf karena dia pernah setahanan bersama Yusuf dan mengetahui kemampuan Yusuf. Pada akhirnya Yusuf memecahkan permasalahan raja tersebut. Dengan

³⁰ Alquran, Yusuf ayat 46-49, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 192..

demikian, Yusuf berkenalan dengan raja dan diberi jabatan sebagai seorang menteri.³¹

Allah SWT telah mengajarkan kepada manusia untuk tidak mengkonsumsi semua kekayaan yang dimiliki pada saat mendapatkannya, tetapi sebaiknya sebagian kekayaan yang didapatkan itu juga ditangguhkan pemanfaatannya untuk keperluan yang lebih penting di masa depan. Dengan demikian, ayat ini menganjurkan untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan dengan tujuan untuk mempersiapkan masa depan.

3. Angkatan Kerja

a. Pengertian Angkatan Kerja

Menurut Sumarsono, “sumber daya manusia dalam sudut pandang ekonomi memiliki pengertian yaitu manusia yang memiliki kemampuan dalam bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa.”³² Mampu bekerja berarti manusia tersebut mampu melakukan suatu kegiatan yang memiliki nilai ekonomis, dimana kegiatan yang dimaksud tersebut dapat menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemampuan bekerja dapat diukur melalui usia dan sering disebut dengan tenaga kerja.

Tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup untuk bekerja.³³ Seseorang disebut sebagai tenaga kerja, meliputi seseorang yang bekerja untuk orang lain dan menerima bayaran berupa upah atau gaji, dan seseorang yang bekerja untuk diri sendiri atau anggota keluarganya dan tidak menerima bayaran berupa upah atau gaji. Seseorang yang bekerja untuk diri sendiri atau anggota keluarganya merupakan seseorang yang

³¹ Mochammad Badrur Rosyid, “Konsep Investasi dalam Al-Qur’an (Telaah Tematik)”, (Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2017), 43.

³² Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), 4.

³³ Sonny, *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*, 5.

sesungguhnya bersedia dan sanggup untuk bekerja, namun mereka manganggur dengan terpaksa karena belum ada kesempatan bekerja.

Tenaga kerja atau penduduk usia kerja 10 tahun ke atas terdiri dari 2 (dua) golongan, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat dan yang sedang berusaha untuk terlibat dalam melakukan kegiatan yang memiliki nilai ekonomis yaitu memproduksi barang dan jasa.³⁴ Dan juga sebaliknya, bukan angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang tidak terlibat atau belum saatnya untuk terlibat dalam melakukan kegiatan yang memiliki nilai ekonomis yaitu memproduksi barang dan jasa.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Jumlah penduduk usia produktif yang semakin besar dari tahun ke tahun, maka akan menambah jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mempengaruhi pada peningkatan tingkat produksi output di suatu wilayah.³⁵ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diperlukan untuk mengukur angkatan kerja. Berikut berbagai tolak ukur untuk mengukur TPAK, antara lain³⁶:

1) Umur

Perilaku TPAK bervariasi menurut kelompok umur. Variasi TPAK dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok umur), antara lain:

- Muda, yaitu dengan usia 10 – 24 tahun
- Prima, yaitu dengan usia 25 – 60 tahun
- Tua, yaitu dengan usia 60 tahun ke atas.

³⁴ Mulyadi Subri, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 60.

³⁵ Trias Fajar Novianto dan Hastarini Dwi Atmanti, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 1992-2011,” *Diponegoro Journal Of Economics* 2, no. 2 (2013): 4.

³⁶ Sonny, *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*, 8-11.

TPAK umur muda biasanya memiliki tingkat partisipasi yang sangat rendah, yaitu maksimal mencapai 30% saja. Hal ini dikarenakan seseorang pada usia 10 – 24 tahun belum stabil dan hubungan dengan pasar tenaga kerja belum erat karena masih dalam usia sekolah. Sehingga mereka belum layak dan belum boleh bekerja. Dan jika dilihat dari persentasi TPAK umur muda menunjukkan bahwa semakin rendah persentase TPAK umur muda, maka semakin tinggi partisipasi mereka terhadap pendidikan.

Sedangkan TPAK umur prima biasanya memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dan stabil. Hal ini dikarenakan seseorang pada usia 25 – 60 tahun telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya atau karena seseorang tersebut telah mengabdikan di perusahaan tertentu dengan jabatan tertentu sehingga mengharuskan untuk tetap aktif bekerja.

Berbeda lagi dengan TPAK umur tua yang biasanya memiliki tingkat partisipasi yang rendah. Hal ini dikarenakan seseorang pada usia 60 tahun ke atas merupakan usia pensiun atau masa pengunduran diri dari pasar tenaga kerja. Seseorang pada usia tersebut dianggap sudah tidak produktif dan kekuatan fisik mereka sudah tidak seperti pada usia prima.

2) Seks

Terdapat perbedaan tingkat partisipasi pada laki-laki dan perempuan merupakan pengaruh dari faktor tradisi, kebudayaan dan fisik. Laki-laki dianggap memiliki kemampuan atau kekuatan yang lebih tinggi daripada wanita, sehingga laki-laki yang memiliki posisi kepala rumah tangga harus bertanggung jawab atas semuanya. Sedangkan wanita dianggap lemah dan tidak pantas untuk bekerja. Dan karena faktor budaya yang demikian, perempuan memiliki tingkat partisipasi untuk tenaganya bukan di pasar tenaga kerja, melainkan di rumah tangga untuk melakukan kegiatan-kegiatan rumah yang tidak produktif atau tidak memiliki nilai ekonomis.

3) Wilayah Kota dan Pedesaan

Perbedaan pemukiman penduduk dapat mempengaruhi perbedaan TPAK. TPAK di pedesaan cenderung lebih tinggi daripada perkotaan. Hal ini dikarenakan penduduk kota memiliki banyak alternatif dalam penggunaan waktu selain bekerja daripada di pedesaan. Pilihan lain atau alternatif selain bekerja di pedesaan sangat terbatas, sehingga mereka mau tidak mau harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

4) Pendidikan

Jenis dan tingkat pendidikan seseorang biasanya dianggap dapat mewakili kualitas tenaga kerja. Produktivitas mereka ditunjang oleh pendidikan yang telah ditempuh pada masa sekolah. Sehingga pendidikan dapat dijadikan sebagai indikator mutu tenaga kerja.

c. Tenaga Kerja Menurut Perspektif Islam

Sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam suatu pekerjaan, baik pekerjaan yang menggunakan mesin maupun manual. Pekerjaan yang menggunakan mesin juga membutuhkan tenaga manusia karena mesin tersebut dapat beroperasi apabila ada yang menjalankan dan mengontrolnya. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan menjadikan bekerja sebagai sebuah kewajiban bagi orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal sesuai dengan amalnya, sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl (16) ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

٩٧ -

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal Shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik

dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”³⁷

Tafsir menurut Ibn Kasir dalam buku Azhari Akmal Tarigan, beliau mengatakan bahwa Allah telah menjanjikan kepada hambanya bahwa siapa saja yang melaksanakan amal sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah di dalam kitabnya dan sesuai pula dengan contoh yang diberikan Rasulullah, maka ia akan diberi balasan berupa kehidupan yang baik di dunia dan mendapatkan balasan amal yang baik di akhirat. Di dalam tafsir tersebut, Ibn Kasir juga mengutip tafsiran yang diberikan para sahabat. Ada yang menyebut *hayatan tayyibatan* adalah *wujuhun al-rahmat min ayyi jihatina kanat*. Ibn Abbas menyebutnya dengan rizki yang halal lagi baik. Ali Ibn Abi Thalib menafsirkannya dengan *al-qana'ah* (sikap *qana'ah*). Ada juga yang memahaminya dengan *sa'adat* (kebahagiaan).³⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk mengerjakan amal shaleh, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, halal, dan bermanfaat bagi orang lain.

Selain itu, Allah SWT juga memberikan penekanan terhadap pekerjaan dan menyatakan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi untuk bekerja keras dengan tujuan mencari penghidupan masing-masing. Allah berfirman dalam QS. Al-balad ayat 4, sebagai berikut:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝ - ٤

³⁷ Alquran, An-Nahl ayat 97, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 222.

³⁸ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi (Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an)*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), 86-87.

Artinya : “Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.”³⁹

Manusia memiliki tingkat kesuksesan yang berbeda-beda dan manusia harus berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, dan tetap tekun dalam menjalani usahanya. Sehingga nantinya manusia akan menikmati hasil yang didapatkan dari kerja kerasnya. Dengan demikian setelah manusia berjuang dengan sungguh-sungguh dan dalam waktu yang lama barulah manusia dapat mencapai kesuksesan dalam hidupnya.

4. Sektor Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Istilah pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta, yang komponennya terdiri dari kata “pari” yang berarti penuh, lengkap, berkeliling, “wis(man)” yang berarti rumah, *property*, kampung, komunitas, dan “ata” berarti pergi terus-menerus, mengembara.⁴⁰ Ketiga kata tersebut apabila dirangkai menjadi satu akan memunculkan istilah pariwisata, yang berarti pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus menerus dan tidak termasuk untuk menetap ditempat yang menjadi tujuan perjalanan.”

Definisi pariwisata terdapat pada Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada Bab I pasal I yang berbunyi:

“Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan

³⁹ Alquran, Al-Balad ayat 4, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 476.

⁴⁰ Fiqih Umi Zakiah, “Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Membangun Infrastruktur Kota Bandar Lampung Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Periode 2010-2017” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 22.

daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.”⁴¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan dalam rangka melakukan perjalanan ke suatu wilayah dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan rekreasi, pengamatan, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan suatu wilayah yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara atau tidak untuk menetap. Sedangkan sektor pariwisata merupakan suatu bidang yang memfokuskan pada suatu wilayah agar menunjukkan potensi yang dimilikinya sehingga dapat menjadi daya tarik wisata untuk dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik.

b. Jenis-jenis Pariwisata

Pariwisata dapat dibedakan berdasarkan berbagai macam keperluan dan kebutuhan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata ke suatu tempat. Sehingga harus dibedakan jenis pariwisata satu dengan jenis pariwisata lainnya.

1) Jenis Pariwisata menurut Motif dan Alasan Perjalanan Wisata

a) Pariwisata untuk menikmati perjalanan

Jenis pariwisata ini merupakan jenis pariwisata dimana tujuan wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk mencari udara segar di tempat yang berbeda, menikmati keindahan alam, mencari ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota, atau menikmati hiburan di kota-kota besar.⁴²

b) Pariwisata untuk rekreasi

Jenis pariwisata ini merupakan jenis pariwisata dimana tujuan wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah memanfaatkan

⁴¹ Undang-Undang RI, “10 Tahun 2009, Kepariwisataaan,” (16 Januari 2009).

⁴² James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 29.

hari-hari liburnya untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya dengan memilih tempat-tempat yang dianggap memiliki tujuan-tujuan rekreasi, misalnya pantai, pegunungan, taman bermain, dan lain sebagainya.

c) Pariwisata untuk kegiatan keagamaan

Jenis pariwisata ini merupakan jenis pariwisata dimana tujuan wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyaksikan upacara-upacara keagamaan, melakukan kegiatan keagamaan atau mengunjungi tempat-tempat keagamaan seperti upacara Bali Krama di Besakih, haji umroh atau ziarah wali bagi agama Islam, dan lain-lain.

d) Pariwisata untuk kebudayaan

Jenis pariwisata ini merupakan jenis pariwisata dimana tujuan wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk melakukan perjalanan yang disebabkan karena adanya daya tarik dari seni dan budaya suatu tempat atau daerah.⁴³

e) Pariwisata untuk olahraga

Jenis pariwisata ini merupakan jenis pariwisata dimana tujuan wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk melihat atau menyaksikan suatu pertandingan olahraga, pesta olahraga, dan lain sebagainya di suatu tempat atau negara tertentu.

f) Pariwisata untuk urusan dagang

Jenis pariwisata ini merupakan jenis pariwisata dimana tujuan wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan baik perdagangan nasional maupun perdagangan internasional.

g) Pariwisata untuk kegiatan sosial

⁴³ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Bali: Pustaka Larasan, 2017), 21.

Jenis pariwisata ini merupakan jenis pariwisata dimana tujuan wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk memberikan bantuan atau mengunjungi tempat-tempat yang bersifat sosial dan dari segi penyelenggaraannya tidak menekankan untuk mencari keuntungan. Misalnya mengunjungi panti asuhan, panti jompo, tempat korban bencana alam di suatu daerah untuk memberikan bantuan sosial.

h) Pariwisata untuk berkonvensi

Jenis pariwisata ini merupakan jenis pariwisata dimana tujuan wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk melakukan berbagai jenis pertemuan baik dari badan-badan maupaun dar organisasi internasional.⁴⁴

2) Jenis Pariwisata menurut Objek Perjalanan Wisata

a) Wisata Budaya

Wisata budaya yaitu jenis pariwisata yang memiliki daya tarik tersendiri dalam hal kesenian, peninggalan sejarah, adat istiadat masyarakat di suatu daerah dan lain sebagainya.

b) Wisata Maritim atau Bahari

Wisata maritim yaitu jenis pariwisata yang memiliki kegiatan wisata yang berhubungan dengan air, dimana kegiatannya memiliki fasilitas untuk melakukan kegiatan berenang, memancing, menyelam, dan olah raga lainnya.

c) Wisata Cagar Alam

Wisata cagar alam yaitu jenis pariwisata yang mengkhususkan perjalanan ke tempat atau daerah cagar alam, taman atau hutan lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya telah dilindungi oleh undang-undang.⁴⁵

⁴⁴ James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata*, 31.

⁴⁵ Arina Nurdiana, "Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015-2018," (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019), 54.

d) Wisata Agro

Wisata agro yaitu jenis pariwisata yang peduli akan lingkungan, go green, dan bertanggung jawab. Wisatawan juga dapat menikmati keindahan alam yang sehat, alamiah dan bebas dari polusi kota. Selain itu wisatawan juga bisa memperoleh hasil pertanian yang segar dan organik atau *green product*.⁴⁶

c. Wisatawan

Menurut Sammeng, “wisatawan adalah Orang yang melakukan perjalanan atau kunjungan sementara secara sukarela ke suatu tempat di luar lingkungan tempat tinggalnya sehari-hari untuk maksud tertentu dan tidak memperoleh penghasilan tetap di tempat yang dikunjungi.”⁴⁷

Terdapat batasan-batasan umum pada istilah wisatawan. Berikut beberapa alasan seseorang dapat dikatakan sebagai wisatawan, antara lain⁴⁸:

- 1) Seseorang yang melakukan perjalanan untuk kesenangan karena alasan keluarga, kesehatan, dan lain sebagainya.
- 2) Seseorang yang melakukan perjalanan untuk keperluan pertemuan-pertemuan atau karena tugas-tugas tertentu, seperti ilmu pengetahuan, tugas pemerintahan, diplomasi, agama, olahraga, dan lain sebagainya.
- 3) Seseorang yang melakukan perjalanan dengan tujuan usaha.
- 4) Seseorang yang datang dalam rangka melakukan perjalanan dengan kapal laut walaupun tinggal kurang dari 24 jam.

⁴⁶ Arina Nurdiana, “Pengaruh Sektor Pariwisata...”, 55.

⁴⁷ Pragustian Saputra, “Pengaruh Jumlah Objek Wisata Dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2017 Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 20-21.

⁴⁸ James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata*, 24.

Selain itu, terdapat juga beberapa alasan seseorang tidak dapat dikatakan sebagai wisatawan, antara lain⁴⁹:

- 1) Seseorang yang datang dengan tujuan mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan usaha di suatu wilayah.
- 2) Seseorang yang datang dengan tujuan mengusahakan tempat tinggal tetap di suatu wilayah.
- 3) Seseorang yang tinggal di suatu negara yang berada di daerah tapal batas negara dan bekerja di negara yang berdekatan.
- 4) Seorang pelajar, mahasiswa, dan orang-orang muda di asrama pelajar dan asrama mahasiswa.
- 5) Seorang wisatawan yang melewati suatu negara tanpa tinggal, walaupun perjalanannya berlangsung lebih dari 24 jam.

Menurut Nawawi dalam bukunya mengatakan mengenai pengaruh langsung kunjungan wisatawan terhadap pendapatan dan perekonomian daerah, yaitu “semakin lama wisatawan menginap dalam setiap kunjungan wisata maka secara langsung pengaruh ekonomi dari keberadaan wisatawan tersebut juga semakin meningkat.”⁵⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan wisatawan yang berkunjung baik menginap maupun tidak menginap dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah setempat. Hal ini dilihat dari keberadaan wisatawan di tempat wisata yang memungkinkan akan mengeluarkan uang untuk beberapa kebutuhan dan keinginannya yaitu makanan, minuman, toilet, penginapan, transportasi umum, fasilitas-fasilitas yang tidak gratis, dan oleh-oleh khas daerah tersebut yang akan dibawa pulang. Sehingga dengan adanya wisatawan tersebut, maka perekonomian masyarakat setempat akan meningkat dan pendapatan daerah setempat juga akan mengalami peningkatan.

⁴⁹ James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata*, 24.

⁵⁰ Pragustian Saputra, “Pengaruh Jumlah Objek Wisata...”, 21.

d. Pariwisata dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pariwisata dikenal dalam istilah bahasa arab dengan kata “*al Siyahah, al-Rihlah, dan al-Safar*” atau dalam bahasa Inggris dengan istilah “*tourism*”. Sehingga istilah pariwisata dapat diartikan sebagai “suatu aktivitas atau kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri ataupun negara lain dengan menggunakan kemudahan jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pihak pemerintah maupun swasta dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan (pengunjung) dengan tujuan tertentu.”⁵¹

Suatu hal mengenai pariwisata telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur’an Surat Saba’ ayat 18, sebagai berikut:

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً

وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۚ سِيرُوا فِيهَا لَيَالٍ وَأَيَّامًا آمِنِينَ - ١٨

Artinya : “Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan dengan aman.”⁵²

Menurut tafsir Ibnu Katsir, “negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya” Wahb ibnu Munabbih mengatakan yang dimaksud adalah kampung-kampung yang ada di San’a; Mujahid, Al-Hasan, Sa’id Ibnu Jubair, Malik telah meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam, dari Qatadah, Ad-Dahhak, As-Saddi, dan Ibnu Zaid serta lainnya, bahwa yang dimaksud adalah kota-

⁵¹ Johar Arifin, “Wawasan Al-Quran Dan Sunnah Tentang Pariwisata,” *Jurnal An-Nur* 4, No. 2, (2015): 147-148.

⁵² Alquran, Saba’ ayat 18, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 343.

kota yang berada di negeri Syam. “Beberapa negeri yang berdekatan”, yakni jelas dikenal oleh semua musafir, dimana mereka dapat beristirahat siang di suatu kota, kemudian menginap di kota lainnya. “dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan” artinya, Allah menjadikan letak kota-kota tersebut sesuai dengan jarak tempuh yang diperlukan oleh orang-orang musafir, antara satu dengan yang lainnya. “Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan dengan aman”, yakni dalam waktu kapanpun, baik siang maupun malam, perjalanan mereka akan selalu aman dalam lindungan Allah SWT.⁵³

Dalam kajian islam, wisata dapat dikelompokkan dalam dua aspek, yaitu⁵⁴:

a. Wisata Rohani

Wisata rohani merupakan suatu perjalanan kesuatu tempat yang dilakukan untuk sementara waktu dengan tujuan mencari kepuasan sekaligus pendekatan diri kepada sang pencipta. Contoh wisata rohani adalah masjid yang dijadikan obyek wisata rohani.

b. Wisata Jasmani

Wisata jasmani dapat berupa menyaksikan keajaiban fenomena alam dan pengaturan yang sangat tepat dan serasi yang meliputi semuanya, manusia bisa mengungkap keagungan, kebesaran, kebijaksanaan, pengetahuan Sang Pencipta. Kemudian dia akan merasa takjub dan terpesona, memuji dengan pujian yang paling dalam.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Reformasi terjadi di Indonesia disebabkan oleh adanya krisis ekonomi dan kepercayaan. Sehingga pemerintah mengeluarkan dua undang-undang yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara, yaitu

⁵³ Michael Elkan, “Tafsir Ibnu Katsir”, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-saba-ayat-18-19.html?m=1>, diakses pada 6 Juni 2020.

⁵⁴ Fiqih Umi Zakiah, “Pengaruh Sektor Pariwisata...”, 37-38.

mengenai sistem pemerintahan pusat dan daerah, sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua undang-undang tersebut adalah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah pusat memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah, dengan alasan sebagai berikut⁵⁵:

- a. Intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar pada masa sebelum reformasi menyebabkan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah menjadi rendah, sehingga proses pembangunan ekonomi pemerintah daerah kurang dapat berkembang.
- b. Tuntutan pemberian otonomi muncul sebagai jawaban untuk menghadapi *era new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan di masa mendatang, sehingga diharapkan nantinya pemerintah daerah memiliki lebih banyak peran dalam pembangunan ekonomi.

Pemberian otonomi daerah mengandung 3 (tiga) tujuan utama, antara lain sebagai berikut⁵⁶:

- a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya manusia.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat pada masing-masing daerah otonom.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 pada Pasal 22 ayat 1 menjelaskan bahwa “struktur APBD terdiri dari 3 unsur, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.”

a. Pendapatan Daerah

⁵⁵ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2009), 66.

⁵⁶ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, 99.

Pendapatan daerah adalah sejumlah uang yang diterima oleh pemerintah daerah, baik atas hasil usahanya sendiri maupun atas bantuan dari pemerintah pusat atau dari sumber lainnya yang sah.⁵⁷ Berdasarkan pengertian di atas, adapun struktur pendapatan daerah antara lain:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah melalui intensifikasi (dilakukan pada sumber-sumber yang sudah terbiasa ada di suatu daerah dengan cara penyesuaian tarif, peningkatan sistem pelayanan, dan perbaikan sistem-sistem yang terkait) dan ekstensifikasi (dilakukan untuk menambah sumber pendapatan yang biasa dengan mencari sumber-sumber pendapatan baru yang tidak melanggar atau berlawanan dengan peraturan perundang-undangan).⁵⁸ Besarnya PAD setiap daerah kemungkinan berbeda-beda karena sesuai dengan potensi daerah dan kemampuan pengelolaan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain:

- a) Pajak daerah
- b) Retribusi daerah
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d) Lain-lain PAD yang sah (hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah dengan uang asing, komisi, potongan, dan lain sebagainya)

2) Dana perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana bantuan tetap yang diterima oleh pemerintah daerah setiap

⁵⁷ Sahya Anggara, *Administrasi Keuangan Negara* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 325.

⁵⁸ Sahya, *Administrasi Keuangan Negara*, 326.

tahunnya dari pemerintah pusat, namun besarnya dana tersebut setiap tahunnya dapat berubah-ubah.⁵⁹

Dana perimbangan bersumber dari:

- a) Dana bagi hasil, yang berasal dari pajak, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
- b) Dana alokasi umum (DAU), yang berasal dari pendapatan bersih dalam negeri.
- c) Dana alokasi khusus (DAK), yang berasal dari selain poin (a) dan (b).

Dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil dan DAU bersifat *block grant*, yaitu pemerintah pusat memberikan kebebasan terhadap pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan yang terkait tapi harus sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Sedangkan dana perimbangan yang berasal dari DAK bersifat *specific grant*, yaitu pemerintah pusat tidak memberikan kebebasan terhadap pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan terkait, karena ketentuan dan peraturannya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat terlebih dahulu.

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan dana yang diterima oleh pemerintah daerah, namun tidak tetap waktu dan besarnya. Hal tersebut kecuali dana otsus, karena bergantung pada situasi yang memerlukan.⁶⁰ Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu berupa:

- a) Dana hibah
- b) Dana darurat
- c) Dana penyesuaian dan dana otsus
- d) Bantuan dari daerah yang lebih tinggi (provinsi) atau daerah lain.

b. Belanja Daerah

⁵⁹ Sahya, *Administrasi Keuangan Negara*, 326.

⁶⁰ Sahya, *Administrasi Keuangan Negara*, 327.

Unsur dari APBD yang kedua adalah belanja daerah. Belanja daerah atau belanja daerah merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakat daerah. Anggaran belanja unit kerja dikelompokkan menjadi dua, antara lain⁶¹:

1) Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang telah direncanakan. Jenis-jenis belanja langsung, antara lain: Belanja Pegawai/ Personalia, Belanja Barang/ Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas.

2) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang telah direncanakan.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pasal 60 ayat 1 menjelaskan bahwa “penerimaan pembiayaan mencakup (1) selisih lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), (2) pencairan dana cadangan, (3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) penerimaan pinjaman daerah, (5) penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan (6) penerimaan piutang daerah.”⁶²

⁶¹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, 194

⁶² Abdul Hafiz Tanjung, *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 8

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun, dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Sayekti Suindyah D (2009) “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Timur”	Y : Pertumbuhan Ekonomi X1 : Investasi X2 : Tenaga Kerja X3 : Pengeluaran Pemerintah	1. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 3. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 4. Investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi
2	Afrizal Tahar & Maulida Zakhiya (2011) “Pengaruh	Y1 : Kemandirian Daerah Y2 : Pertumbuhan Ekonomi X1 : Pendapatan Asli Daerah	1. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. 2. DAU berpengaruh negatif dan

	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”	X2 : Dana Alokasi Umum	signifikan terhadap kemandirian daerah. 3. PAD, DAU dan kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3	Chindy Febry Rori, Antonius Y Luntungan, dan Audie O Niode (2016) “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013”	Y : Pertumbuhan Ekonomi X : Pendapatan Asli Daerah	PAD berpengaruh positif atau signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2001 –2013
4	Irwan Pirda Atmi Danisa (2018) “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing	Y1 : Pertumbuhan Ekonomi Y2 : Kesempatan Kerja X1 : Penanaman Modal dalam Negeri X2 : Penanaman Modal Asing X3 : Belanja	1. PMDN dan PMA berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Pengeluaran pemerintah secara langsung berpengaruh positif tidak signifikan

	Serta Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesempatan Kerja Di Propinsi Kalimantan Timur”	Pemerintah	terhadap pertumbuhan ekonomi. 3. PMDN dan PMA berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja. 4. Belanja Pemerintah secara langsung berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kesempatan kerja.
5	Phany Ineke Putri (2014) “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Belanja Modal, Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa”	Y : Pertumbuhan Ekonomi X1 : Investasi X2 : Tenaga Kerja X3 : Belanja Modal X4 : Infrastruktur	1. PMDN berpengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. PMA berpengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 3. Tenaga kerja berpengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 4. Belanja modal berpengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 5. Infrastruktur berpengaruh yang positif signifikan

			terhadap pertumbuhan ekonomi 6. PMDN, PMA, tenaga kerja, belanja modal, infrastruktur berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
6	Shakhibul Amnar, Said Muhammad, M. Nur Syechalad (2017), “Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Sabang”	Y : Pertumbuhan Ekonomi X : Pariwisata	1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Wisatawan nusantara berpengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi 3. Jumlah Lokasi wisata berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi 4. Jumlah kamar hotel / tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan fenomena perekonomian yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah, dapat diketahui bahwa besarnya persentase laju pertumbuhan ekonomi berbeda di setiap daerah. Hal ini dikarenakan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, kemajuan teknologi, dan faktor lainnya yang dimiliki setiap kabupaten/kota juga berbeda-beda. Sehingga dengan adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, maka dapat disusun kerangka berfikir untuk menyatukan pemikiran dalam penelitian ini.

Kerangka berfikir pada penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel bebas yaitu investasi, angkatan kerja, sector pariwisata dan pendapatan asli daerah terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah senantiasa berupaya untuk meningkatkan perekonomian yaitu dengan menciptakan iklim investasi yang hasilnya sangat bermanfaat bagi perekonomian daerah. Investasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk membangun perekonomian suatu daerah. Investasi ini dapat dilakukan oleh pihak swasta, pemerintah, maupun kerja sama antara swasta dengan pemerintah.

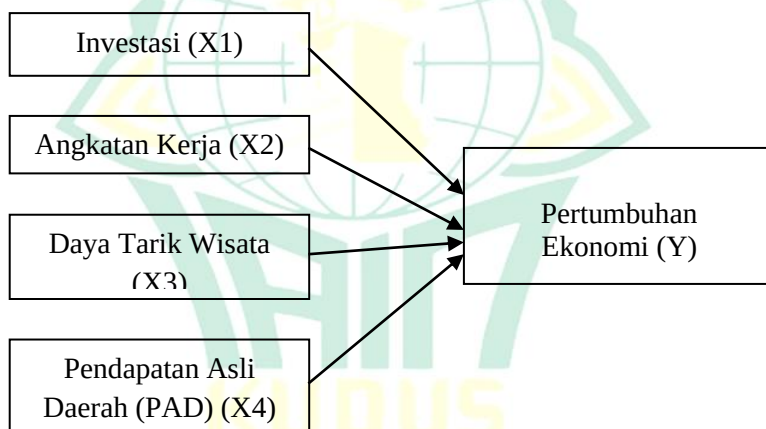
Selain investasi, angkatan kerja yang merupakan manusia yang mampu bekerja juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan angkatan kerja merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensial tinggi untuk menjadi penggerak, penggagas, dan pelaksana pembangunan ekonomi di suatu daerah. Semakin banyak angkatan kerja yang berkualitas, maka semakin banyak pula output atau hasil yang diperoleh sehingga dapat meningkatkan pendapatan angkatan kerja itu sendiri dan pemerintah daerah.

Salah satu penerapan investasi pemerintah adalah pembangunan sektor pariwisata. Setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi wisata yang berbeda-beda mengikuti keadaan alam, sosial, dan budayanya masing-masing. Namun, dengan adanya obyek wisata di suatu daerah tidak menutup kemungkinan bahwa perekonomian daerah setempat akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat setempat akan terjamin. Hal ini dikarenakan adanya potensi usaha yang dapat dilakukan di obyek wisata tersebut, misalnya menjual makanan, minuman, oleh-oleh, kerajinan khas daerah

setempat, menyediakan toilet umum, penginapan, dan fasilitas lainnya yang dapat dijadikan lapangan usaha.

Pembangunan daerah dengan sistem otonomi daerah dibentuk agar tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan sebagai sumber utama pendapatan suatu daerah. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan sendiri selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas sumber daya manusia agar perekonomian daerah tersebut dapat tumbuh.

Bagan kerangka pemikiran berdasarkan uraian di atas dapat dilihat sebagai berikut:



D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara/kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang ada yang diajukan oleh peneliti yang sebenarnya harus diuji secara empiris.⁶³ Berdasarkan kerangka berfikir penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶³ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Prenadamedia, 2013), 38.

- H₁ : Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H₂ : Angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H₃ : Daya tarik wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H₄ : Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

